

### PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang





# LAPORAN PERKEMBANGAN PEMANFAATAN E-SPPT

Tribulan 2 Tahun 2024

1. Nama Inovasi

Aplikasi e-SPPT

2. Latar Belakang

Pajak Daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011).

Hal ini tertuang juga didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan menetapkan tarif dibeberapa jenis pajak dan retribusi daerah, serta menetapkan tarifnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sector pajak daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan Inovasi Peningkatan Pajak. Dari inovasi ini diharapkan akan terlihat peningkatan penerimaan PAD untuk wilayah Kota Malang. Karena dari sector pajak daerah ini khususnya PBB masih terdapat kekurangan dalam hal perkembangan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi proses penerimaan PAD.

Selain itu, demi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah serta meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar PBB melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin pesar, maka diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dipandang perlu dilakukan inovasi peningkatan pajak.

3. Tujuan

Tujuan dari Implementasi e-SPPT ini adalah:

- 1. Melakukan transformasi dari system manual ke digital sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
- 2. Memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam mengetahui besaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tagihan/tunggakan PBB nya, karena e-SPPT dapat diakses dimana saja.

4. Sasaran

Sasaran yang akan dituju dari kegiatan implementasi Aplikasi e-SPPT ini adalah :

- 1. Tersedianya pelayanan PBB terutama Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) secara elektronik;
- 2. Tercapainya realisasi penerimaan PBB secara optimal karena Wajib Pajak dapat mengetahui tagihan PBB nya lebih cepat.
- 5. Langkah Kerja

Lingkup pelaksanaan implementasi Aplikasi e-SPPT dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Persiapan

Kegiatan persiapan yaitu melakukan persiapan server aplikasi dan *set up* jaringan serta perangkat pendukung.

#### 2. Kegiatan Pengembangan

Kegiatan pengembangan dilakukan untuk melaksanakan proses pengkodean (coding) aplikasi e-SPPT.

#### 3. Kegiatan Uji Coba

Kegiatan uji coba dilakukan untuk melakukan uji coba aplikasi e-SPPT untuk memastikan tidak ada kendala di fase implementasi.

#### 4. Implementasi

Melaksanakan penerapan Aplikasi e-SPPT.

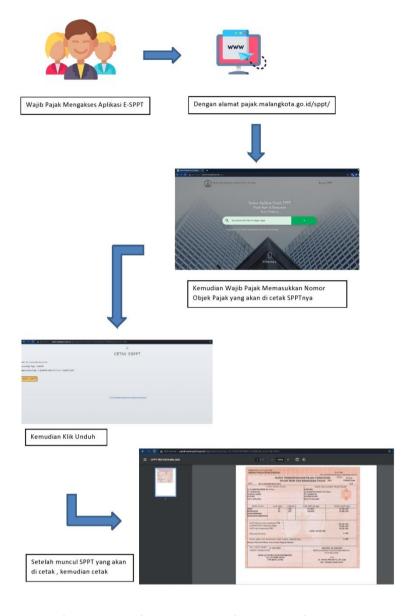
6. *Timeline* dan Pelaksanaan

Timeline implementasi Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :

No.	TAHAPAN	TAHUN 2020				2021	2022	2023
		Apr	Mei	Jun	Jul	2021	2022	2023
1.	Persiapan							
2.	Pengembangan							
3.	Uji Coba							
4.	Implementasi							

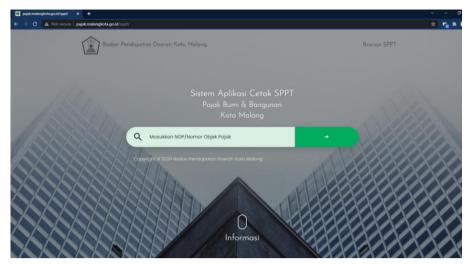
7. Standard
Operating
Procedure (SOP)
Aplikasi

SOP dari Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :



- Wajib Pajak mengakses laman e-SPPT (pajak.malangkota.go.id/sppt);
- 2. Wajib Pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang akan dicetak SPPTnya;
- 3. Klik unduh SPPT kemudian cetak SPPT.

#### 8. Dokumentasi Tampilan Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :



### 9. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dalam rangka kegiatan Inovasi e-SPPT meliputi :

- 1. Membuat Sistem Aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas; dan
- 2. Bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce* penyedia *platform* pembayaran *online*, seperti :
  - Indomaret,
  - Alfamart,
  - Alfamidi,
  - Tokopedia,
  - Gopay, dan sejenisnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun.

#### Dampak Aplikasi

Proses mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebelum adanya aplikasi, adalah sebagai berikut :

- Apabila masyarakat ingin mendapatkan besaran tagihan/tunggakan PBB, maka masyarakat harus datang ke Bapenda Kota Malang;
- Apabila masyarakat ingin mendapatkan SPPT tercetak, maka masyarakat harus ke kelurahan setempat dan menunggu proses masal;
- 3. Masyarakat dapat mengurus SPPT hanya pada jam kerja saja.

Proses mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pada Aplikasi (e-SPPT) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak perlu datang ke Bapenda, melainkan bisa mengakses seluruh informasi dari *website* e-SPPT;

- 2. Masyarakat juga dapat mengakses rincian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 3. Tampilan *website* yang *user friendly*, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

## 11 Data Pemanfaatan

Data Pemanfaatan dari Aplikasi e-SPPT berupa SPPT yang tercetak dapat dirincikan sebagai berikut :

TRIBULAN	TAHUN	JUMLAH	TARGET	REALISASI	
	2022	5.728 berkas	8.000.000.000	11.329.616.990	
	2023	11.727 berkas	7.300.000.000	5.646.491.902	
	2024	23.682 berkas	5.110.000.000	10.414.774.271	
	2022	7.302 berkas	24.000.000.000	23.698.631.993	
11	2023	38.400 berkas	21.900.000.000	26.011.059.640	
	2024	27.622 berkas	14.600.000.000	24.452.305.494	
	2022	8.259 berkas	24.000.000.000	30.066.838.467	
COMPANY COMPAN	2023	16.952 berkas	18.250.000.000	31.942.064.493	
	2024	-	-		
	2022	17.347 berkas	24.000.000.000	8.075.446.587	
IV	2023	9.154 berkas	32.850.000.000	9.591.234.931	
	2024	_	-	-	

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA MAKANG,

Dr. HANDI PRIYANTO,. AP., M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 19760607 199412 1 001